



TINJAUAN KONSEPTUAL PEREMPUAN DAN MODERNITAS DALAM RUANG KOLONIALISME

Arif Subekti

arif.subekti.fis@um.ac.id

Universitas Negeri Malang, Indonesia

ARTICLE INFO

Received: 17th May 2021

Revised: 30th June 2021

Accepted: 30th June 2021

Published: 30th June 2021

Permalink/DOI

10.17977/um020v15i12021p183

Copyright © 2021, *Sejarah dan Budaya*. All right reserved

Print ISSN: 1979-9993

Online ISSN: 2503-1147

ABSTRACT

Under colonial rule, native women are double subordinated, both by colonialism, as a colonized objects, and by the patriarchal system. However, it does not hinder the absorption of Western ideas of modernity, particularly among native women. This article aims to describe the absorption and spread of Western modernity values onto native women under colonial rule. This article identifies the social roles, occupations, positions in society, and the influence of modernity received by native women.

KEYWORDS

women; modernity; colonialism.

ABSTRAK

Nusantara pada masa kolonial memosisikan perempuan Bumiputera dalam penjajahan yang berganda. Pertama, ia dijajah oleh sistem patriarki berdasarkan nilai-nilai tradisional dan tempatan. Kedua, ia bersama segenap warga Bumiputera pria, adalah hamba jajahan. Namun, hal ini tidak menghambat penyerapan ide-ide modernitas Barat terhadap perempuan Bumiputera. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan penyerapan dan penyebaran nilai-nilai modernitas Barat terhadap perempuan Bumiputera dalam ruang kolonialisme. Dengan menggunakan studi pustaka, hasil dari artikel ini adalah identifikasi peran sosial, prestasi yang diduduki, posisi dalam masyarakat, serta pengaruh modernitas yang diterima perempuan Bumiputera.

KATA KUNCI

perempuan; modernitas; kolonial

PENDAHULUAN

Perempuan, bisa dikatakan, adalah “barang baru” dalam catatan sejarah. Keberadaannya, apalagi perannya, dalam banyak peristiwa sejarah dinilai tertutup oleh dominasi dan hegemoni pria; maka muncul anggapan bahwa sejarawan hanya atau hampir selalu menulis sejarah dari sudut pandang maskulin. Meskipun asumsi ini tidak sepenuhnya tepat, karena bisa jadi bahwa marginalisasi terhadap kaum perempuan memang banyak terjadi di banyak tempat dan banyak masa, namun dapat diakui bahwa kajian sejarah mengenai perempuan dan atau sejarah dari sudut pandang perempuan baru muncul beberapa dekade silam, seiring gencar dan meluasnya gerakan feminisme.

Disamping marginalisasi perempuan dalam iklim patriarki, yang menempatkan perempuan “hanya” sebagai *konco wingking*, perlu dipertimbangkan pula bahwa dunia kolonialisme yang menerapkan diskriminasi berdasarkan ras, membuat perempuan pribumi dapat dikatakan mengalami marginalisasi ganda, yakni oleh pihak laki-laki dan pihak penjajah. Dengan demikian, dapat diasumsikan secara kasar, bahwa konteks sejarah kolonialisme memang hampir-hampir menutup celah bagi perempuan untuk berperan dalam banyak lini kehidupan perjuangan nasionalisme, khususnya dalam proses modernisasi. Namun demikian, sekecil apapun celah atau kemungkinan tersebut, seyogyanya tetap menjadi kajian bagi sejarawan.

Sementara modernitas –bisa dimaknai sebagai kurun sejarah, semangat zaman, atau suatu bentuk rekayasa budaya tertentu– dalam kaca mata orientalisme, juga merupakan “barang baru” bagi penduduk terjajah, yang membedakan suatu kurun masa atau semangat zaman tertentu dengan masa sebelumnya, yakni kurun tradisional, dan “atas nama pemberadaban” mengisinya dengan kultur yang baru, yang berasal dan dibawa dari Barat. Ruang interaksi yang menjadi saluran dari modernitas kemudian melibatkan agen-agen kebudayaan tertentu, dan diasumsikan bahwa salah satunya melibatkan keberadaan dan atau diperankan oleh perempuan.

Tulisan ini hendak membahas keberadaan atau eksistensi serta peran perempuan dalam penyerapan dan penyebaran nilai-nilai modernitas Barat, dengan mengambil konteks kolonialisme sebagai kerangka ruang dan waktu. Jika secara apriori, pernyataan: bahwa perempuan memiliki peran dalam modernisasi pada masa kolonial, ini diterima dan dibenarkan, maka pertanyaan pertama dan mendasar yang muncul adalah, siapa sajakah perempuan-perempuan tersebut? Identifikasi mengenai perempuan dilihat dari sisi peran sosial, bisa dijadikan langkah awal atau pusat permasalahan yang selanjutnya melebar atau mengenai konsep lain, seperti ruang dimana interaksi sosial ini berlangsung, hingga wujud atau bentuk modernitas yang diusung.

Sebagai langkah awal, akan dipaparkan dahulu pengertian mengenai modernitas yang bisa dikatakan *omnipresent* sifatnya, dalam arti modernitas adalah istilah yang hadir di banyak konteks pembacaan dan penulisan sejarah. Untuk itu, dipaparkan tiga contoh pengertian modernitas, yakni modernitas dalam kerangka sejarah Indonesia sebagaimana pembacaan Ricklefs, modernitas dalam pembacaan sejarah mondial, dan modernitas dalam kerangka sejarah nasional Indonesia. Langkah berikutnya adalah

pembahasan kota sebagai ruang modernitas, dalam arti kota dan aspek-aspek yang mengiringinya, diposisikan sebagai wujud dari modernitas itu sendiri, sehingga pembahasan mengenai perempuan dan modernitas, mengambil setting wilayah perkotaan kolonial. Tahap selanjutnya, adalah pengidentifikasian perempuan dilihat dari peran sosial atau prestasi yang didudukinya, posisi dalam masyarakat, hingga pengaruh modernisasi yang diterima serta disebarkannya, dimana perhatian pada tulisan ini terutama ditujukan pada sosok *babu*, pelajar perempuan, serta tokoh imajinasi berupa Nyai Ontosoroh.

METODE

Artikel ini menggunakan metode kajian literatur, yang dilakukan dengan melakukan review komprehensif dari kajian-kajian terdahulu perihal kolonialisme, sejarah perempuan, dan modernitas. Hal ini dilakukan dengan menelaah jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Modernitas

Pendedahan pengertian modernitas yang digunakan di sini, kiranya perlu untuk dipaparkan, mengingat term modernitas sendiri memiliki dimensi makna yang berkembang. Term *modern*, dimaknai sebagai kurun waktu tertentu, menjadi batasan konseptual dan atau batasan waktu dalam berbagai karya historiografi; seperti tampak dalam Ricklefs (1993) dimana predikat “modern” yang Ricklefs sematkan dalam karya historiografinya, atau dalam kalimat lain, menjadi alasan yang membangun periodisasi historiografinya, terbangun di atas tiga unsur fundamental, yakni: a) unsur kebudayaan dan agama: islamisasi Indonesia yang dimulai pada tahun + 1300; b) unsur topik: saling pengaruh antara orang Indonesia dan orang Barat + 1500 dan masih berlanjut; c) historiografi: sumber-sumber primer sepanjang periode ini ditulis hampir secara eksklusif dalam bahasa-bahasa Indonesia modern (Jawa, Melayu baru, bukan kuno), dan dalam bahasa Eropa. Modernitas –dalam hal ini dimaknai sebagai konsep yang dalam linearitas kronologi merupakan babak setelah tradisionalitas– dibatasi dengan tonggak sejarah tertentu, yang luas pengaruhnya mengatasi ruang Nusantara.

Pembicaraan modernitas di atas panggung sejarah dunia, dengan menempatkan determinasi orang-orang Eropa, khususnya bangsa penjelajah samudra dari Semenanjung Iberia (orang Spanyol dan Portugis), dapat dimaknai sebagai pengertian yang memayungi gagasan-gagasan besar pasca-Pencerahan, yang dalam kerangka difusi, kemudian menyebar dari pusat ke pinggir (*center to peripheral*), yakni dari negara-negara Eropa yang maju ke wilayah-wilayah Asia, Afrika, serta Dunia Baru yang terjajah. Wujud dari modernitas global ini dalam identifikasi yang kasar/secara garis besar, berupa penggunaan rasionalitas, perkembangan kapitalisme dan industrialisasi, termasuk juga efek serta eksekusi jangka panjangnya, seperti urbanisasi, konsumerisme, dan individualisme (Smith, Van De Mierop, and von Glahn 2012).

Akan halnya, dalam kerangka ruang dan waktu kolonialisme di Nusantara, modernitas adalah suatu hal yang dibawa dan atau ukuran-ukuran tertentu yang distandardisasikan oleh pihak penjajah (*colonizer*) untuk diperkenalkan dan disebarkan pada pihak terjajah (*colonized*). Ketimpangan posisi antara penjajah yang superior dan telah modern berhadapan dengan pihak terjajah yang inferior dan perlu diberadabkan ini, menggambarkan juga bahwa hampir setiap hal baru dari negeri penjajah adalah modern dan terdapat kewajiban atau tugas mulia untuk menularkan ke-modern-an ini di tanah jajahan.

Sebagian sejarawan berpendapat bahwa tonggak sejarah yang dianggap mengawali modernisasi di Hindia Belanda adalah Politik Etis, yang pengertiannya bisa dirunut dari beberapa item yang dikandungnya. Menurut Poeze, Politik Etis adalah kebijakan yang diarahkan untuk meletakkan seluruh kepulauan Indonesia di bawah kekuasaan Belanda secara nyata, dan untuk mengembangkan negeri dan bangsa di wilayah itu ke arah pemerintahan sendiri di bawah pimpinan Negeri Belanda menurut model Barat. Definisi ini dibangun oleh beberapa segi dari Politik Etis, yakni: kesadaran akan panggilan moral untuk mengantarkan dan mendorong orang Jawa ke arah kesejahteraan; tugas meletakkan daerah seberang di bawah kekuasaan Belanda yang efektif agar di sana pun kesejahteraan dapat diwujudkan; mengakhiri pemindahan *batig saldo* (surplus anggaran belanja) dari anggaran Hindia ke kas Negeri Belanda, dan dengan demikian mengakhiri eksploitasi orang Hindia; mengusahakan agar orang Indonesia berhubungan dengan budaya dan pendidikan Barat (yaitu konsep tentang “asosiasi”)(Poeze, Dijk, and van der Meulen 2008: 25; Toer 1981:216).

Konsepsi Politik Etis ini, sebagaimana nampak dalam definisi dan segi-seginya di atas, bisa dinilai bersifat paradoksal; dimana upaya pasifikasi atas keseluruhan kepulauan Nusantara, disebutkan bertujuan untuk mengembangkan pemerintahan sendiri, yang kemudian diperlengkap dengan kalimat “di bawah pimpinan negeri Belanda”. Paradoks yang lain adalah bahwa Politik Etis yang ditujukan bagi kepentingan orang Indonesia, khususnya dalam wujud campur tangan sejumlah dinas khusus atas kehidupan pedesaan yang sampai waktu itu belum tersentuh, di sisi lain berbanding lurus dengan keuntungan yang didapatkan orang Eropa atas kebijakan ini. Melibatkan desa dalam susunan ketatanegaraan berarti juga memasukkan orang desa ke dalam ekonomi uang, dan akibatnya industri memperoleh lebih banyak kesempatan memasarkan barang. Orang Eropa di daerah jajahan memperoleh keuntungan dari adanya kemungkinan yang lebih luas bagi Hindia untuk menyelesaikan urusannya sendiri, dan juga dari semakin banyaknya kemungkinan kerja di sektor pemerintahan dan industri(Poeze, Dijk, and van der Meulen 2008:26).

Modernisasi yang terkandung di dalam definisi Politik Etis tersebut juga mengandung pengertian bahwa asal-usul standard modern sebagaimana dimaksud adalah negeri Belanda, dan atau standard dari negeri-negeri Barat yang ekuivalen dengan taraf keberadaban Belanda. J.S. Furnivall menggambarkan bagaimana karakteristik politik kesejahteraan Belanda atas Hindia Timur ini, dengan menyerupakannya

sebagaimana bentuk perwalian atau pengawasan atas anak kecil. Dalam bahasa tutur, Furnivall memberikan ilustrasi bagaimana kira-kira perkataan orang Belanda pada penduduk Hindia Timur:

all these people want to help so much: "let me help you", or you can hear them say, "let me show you to do it, let me do it for you".(Locher-Scholten 2000:18)

Dus, sebagai kerangka penulisan, modernitas dalam masa kolonialisme bisa diartikan sebagai gagasan pem-Barat-an pada penduduk pribumi atau pihak terjajah dari pihak penjajah yang dimanifestasikan dalam kebijakan-kebijakan tertentu sebagaimana digariskan oleh pemerintah kolonial dan dengan mengacu pada Politik Etis sebagai panduannya. Objek dari modernisasi ini, termasuk di dalamnya, adalah kaum perempuan, dimana medium interaksi serta saluran-salurannya mewujud dalam beberapa ruang budaya.

Kota dan Modernitas

Anggapan awal (*prior knowledge*) sejarawan saat mendedahkan modernitas akan tertumbuk pada ruang budaya bernama kota, wilayah dimana modernitas menjadi ciri yang didaku secara eksklusif, dan sekaligus pusat dimana proses modernisasi melakoni dan menyebarkan gagasan-gagasan tentang kemajuan, persamaan kesempatan, perkembangan, dan sebagainya. Di wilayah inilah, kantor dinas pemerintahan berada dan menjalankan administrasi kekuasaannya, kegiatan ekonomi dengan institusi pasar sebagai representasi perputaran uang, serta beraneka ruang budaya (sekolah, bioskop, taman kota, sarana transportasi, bahkan garnisun atau markas polisi serta militer, dan sebagainya); merupakan ruang interaksi sosial dimana modernitas sebagai gagasan menjadi gaya hidup yang identik sekali dengan kehidupan masyarakat perkotaan.

Memakai logika bineritas, kota dengan label modern umumnya dipertentangkan dengan wilayah desa (kampung) yang dilekati sifat tradisional, dan dalam konsep struktur ekonomi kolonial, logika pertentangan ini juga dipergunakan untuk membagi atau membedakan antara sektor ekonomi tradisional yang terutama didasarkan pada sistem produksi subsisten dengan sektor modern yang mempergunakan kapital dan teknik modern dalam kegiatan produksi dan manajerialnya. Konsepsi ini secara esensial dipakai pula untuk membagi wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan (McGee 2002:640), hingga pada perkembangan selanjutnya, batas-batas kewilayahan ini semakin absurd dengan perbaikan dan kemajuan sarana transportasi. Modernisasi transportasi, bisa dijelaskan dengan perbaikan, perluasan, dan pembukaan jalan-jalan baru, yang menghubungkan antara pusat (*center*) dengan pinggiran (*periphery*).

Jalan-jalan sebagai prasarana transportasi yang membelah pemukiman penduduk, menghubungkannya dengan pusat keramaian kota, dan juga menghubungkannya dengan desa-desa di wilayah pedalaman; merupakan salah satu faktor penting pertumbuhan ekonomi suatu kawasan. Akses menuju pasar yang lebih

mudah, membuka kesempatan bagi para tengkulak dari desa-desa di pedalaman untuk meningkatkan pendapatannya. Keuntungan pembangunan jalan sebagai sarana transportasi, yang diantaranya ialah: berkurangnya biaya transportasi serta biaya transaksi berbagai komoditi; perbaikan atau kemajuan jaringan transportasi menjadi suatu instrumen penyatuan atau semakin memperkuat konsolidasi lokal kedalam ruang nasional; dorongan pada perkembangan varian dan model transportasi (praoto, kereta, trem, dan sebagainya); serta pembangunan dan perbaikan jalan memperluas dominasi atau pengaruh individu atau kelompok tertentu yang memegang kontrol wilayah tersebut (McGee 2002:638). Dapat diasumsikan bahwa keuntungan terakhir dari keberadaan dan perkembangan sarana-prasarana transportasi, yakni perluasan pengaruh individu dan atau kelompok tertentu, merupakan titik dimana modernisasi menemukan salah satu ruang persebarannya.

Dengan mengasumsikan bahwa modernitas di perkotaan pada awalnya diperkenalkan kepada, dan disebarakan oleh kelas sosial tertentu, yang notabene juga memiliki kekuasaan hingga batas-batas tertentu, maka kajian mengenai modernisasi dalam masyarakat perkotaan masa kolonial pada umumnya bisa dijelaskan dengan mengidentifikasi struktur sosial yang ada di kota-kota kolonial. Secara garis besar, struktur sosial masyarakat pribumi di kota-kota kolonial Hindia Timur pada masa Politik Etis, dapat dibagi dalam kelas-kelas sosial, sesuai peran sosial mereka: kelas atas terdiri atas elit kecil pribumi yang menduduki posisi-posisi politik, militer, serta pengusaha; serta kelas menengah dengan pendapatan ekonomi sedang, terdiri atas pegawai sipil, para guru, pemilik usaha kecil; sedangkan kelas bawah ditempati oleh orang-orang dengan pendapatan kecil, dan berusaha untuk bertahan hidup dalam kehidupan perkotaan, seperti *jongos* (pria pembantu rumah tangga), *babu* (perempuan pembantu rumah tangga), hingga para penjual keliling/pedagang kaki lima serta para perempuan tuna susila (McGee 2002:641).

Babu dalam Rumah Tangga Keluarga Eropa

Bagaimanakah peran *babu* sebagai agen modernisasi? Berawal dari data, bahwa pada paruh kedua abad XIX, peristiwa-peristiwa penting berupa pembukaan Terusan Suez (1869), kemajuan transportasi pelayaran, serta berkembangnya perusahaan-perusahaan Barat di Hindia Belanda, telah mendorong migrasi besar-besaran orang-orang Eropa ke Nusantara (van Imhoff and Beets 2004:48); lantas bisa dirunut bagaimana keluarga-keluarga Eropa pendatang tersebut berkoloni di tanah Nusantara, ditambah dengan orang-orang bangsa Belanda dan Eurasia (*totok/indo*) yang sebelumnya sudah bertempat dan beranak pinak negeri jajahan ini.

Menurut Locher-Scholten, pada awal abad XX, satu keluarga Eropa setidaknya membutuhkan seorang pembantu pria (*jongos* atau *sepen*), seorang pelayan perempuan (*babu*) atau juru masak (*kokki*), dan seorang tukang kebun atau pekerja di kandang kuda (*kebon*) (Locher-Scholten 2000:89). Kebiasaan adanya *abdi dalem*, *kawula*, *babu*, dan bentuk pelayanan dalam keluarga ini memang telah cukup lama hidup di dunia

feodal Nusantara, namun banyak hal besar yang membedakan dua bentuk pengabdian ini. Selain gaji yang disisi lain juga mengenalkan nilai ekonomis atas jasa, pada tahun 1931, sebuah Asosiasi Perempuan Pembantu Rumah Tangga di Hindia (*Vereniging voor Huisvrouwen in Indië*) didirikan, yang berfungsi menjadi perantara antara pihak peminta tenaga kerja dan pihak pencari kerja. Oleh karena pada perkembangannya, organisasi ini memberikan kursus ketrampilan menjahit bagi *babu*, dan kursus singkat mengenai masakan Eropa kepada *kokki* (juru masak), serta semacam sekolah lanjutan (dua tahun) bagi gadis-gadis dari desa mengenai keterampilan rumah tangga (*nijverheidsonderwijs voor meisjes*) (Locher-Scholten 2000:92), maka dapat disimpulkan bahwa telah terbentuk semacam profesionalitas pada golongan perempuan pegawai rumah tangga.

Masalah kebersihan dan kesehatan juga menjadi titik tekan pemerintah dan masyarakat Eropa di Hindia Belanda dalam memberikan kebijakan atau penyiksaan terhadap para pembantu rumah tangga. Kebiasaan dari *kampung*, yang (dalam pandangan orang Eropa) tidak sehat dan tidak bersih, seperti tidak adanya kebiasaan mencuci baju, mandi, mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, dan seterusnya; perlu dirubah. *Nyonya* Eropa yang mendapati putra-putrinya menderita penyakit, akan mudah menyalahkan si *babu* oleh karena standar kebersihan dan kesehatannya yang dinilai membawa wabah penyakit. Di sisi lain, *nyonya* Eropa tersebut tetap membutuhkan tenaga si *babu* untuk mengurus anaknya, atau membantu pekerjaan rumah tangga lainnya, karena di Hindia Belanda, *nyonya* Eropa tidak terbiasa mencuci, membersihkan, dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga mereka (van Dijk, Taylor, and Koninklijk Instituut voor Taal- 2011:26). Hingga terdapat ungkapan bernada rasis sekaligus sarkastis dari J. Kloppenburgh-Versteegh, yang berbunyi:

“Our servants are like big children. Let us try to understand their situation and feel compassion for them, this will urge us to improve their lot, to uplift them. European (both totok and Indies) women should educate their servants, teach them hygiene, and improve their standard of life.” (Locher-Scholten 2000:96)

Jika kebersihan dan kesehatan, -misalnya pemakaian sabun mandi, sebagaimana yang digambarkan oleh Henk Schulte Nordholt (dalam Bloembergen and Raben 2009:111)-adalah salah satu wujud dari modernisasi, maka bisa disimpulkan bahwa konsepsi mengenai hidup bersih dan sehat yang harus dijalankan dan diterima oleh si *babu* dalam kehidupan sehari-harinya sebagai pembantu rumah tangga, mungkin dan dapat ia tularkan sekembalinya si *babu* ke kampungnya.

Kesempatan Mendapatkan Pendidikan

Aspek modernitas sebagaimana terkandung dalam segi Politik Etis di atas, ialah – terutama sekali– dalam hal pendidikan dan kebudayaan. Kebutuhan akan tenaga pegawai pemerintahan, pengajar, juru tulis pabrik, tenaga medis, jurnalis, dan lapangan kerja yang mensyaratkan tenaga terdidik lainnya; meniscayakan pendidikan sebagai salah satu sarana menaikkan taraf hidup masyarakat masa kolonial, terlebih bagi seorang pribumi.

Golongan yang umumnya mendapatkan pendidikan hingga tingkat tertentu adalah putra kaum elit tradisional (para *raden* atau di sebagian masyarakat, disebut *sinyo*). Hal ini terutama sekali disebabkan, bahwa dalam sistem pemerintahan Belanda yang tidak langsung itu (*het systeem van indirect bestuur*), para priyayi pejabat pemerintahan dari orang-orang pribumi yang kemudian disebut pangreh praja (*de inheemse bestuurselite*) merupakan sendi penghubung antara pemerintah Belanda dan rakyat (Bloembergen and Raben 2009:105-106).

Agar para priyayi dapat melakukan tugasnya dengan baik, maka sejak sekitar tahun 1850, diambil langkah untuk menyekolahkan mereka. Pada tahun 1879, Sekolah-Sekolah Raja yang pertama didirikan guna mendidik para *ambtenaar* pemerintahan Hindia Timur, hingga pada peralihan abad, kemungkinan untuk memperoleh pengajaran sangat diperluas. Para pembela politik etis terkemuka tidak jemu-jemunya mendesak untuk memperluas kesempatan orang pribumi untuk mendapatkan pendidikan. Dasar untuk memperoleh kemajuan lebih lanjut, menurut gagasan mereka, adalah memperluas pengajaran. Dengan demikian dapat dipenuhi juga kebutuhan akan tenaga yang terdidik khusus untuk pemerintahan dan industri. Sekolah-sekolah raja disusun ulang dan rencana pelajarannya diperluas; demikian pula yang terjadi dengan Sekolah Pendidikan Dokter Jawa (Stovia). Sekolah-sekolah guru memperoleh semangat baru, kemudian didirikan pula sekolah hukum, sekolah dokter hewan, dan sekolah tinggi pertanian. Dalam hal ini diusahakan agar rencana pengajaran sesuai dengan sekolah-sekolah serupa di Negeri Belanda. Untuk itu syarat utama adalah penguasaan bahasa Belanda yang baik. Lulusan sekolah-sekolah tersebut tanpa kesulitan bisa dipakai di lembaga-lembaga negara dan industri, dan dengan demikian menghemat tenaga Eropa yang umumnya lebih mahal (Poeze, Dijk, and van der Meulen 2008:26).

Selain priyayi-priyayi tinggi yang tergolong elite karena kelahiran, lewat sekolah-sekolah itu masuk pula orang-orang yang kemudian tergolong elite priyayi karena pendidikan. Dilihat dari asal-usulnya, mereka itu tergolong kelompok elite priyayi rendah, atau bahkan jelata yang menjadi priyayi.¹ Prinsip-prinsip kemajuan (*ontwikkeling*) atau persamaan (*gelijkmatigheid*) dari Politik Etis secara umum memang membawa perubahan pada kebijakan pemerintah terhadap penduduk pribumi, namun bagaimanakah dengan nasib kaum perempuan?

Tidak seperti kaum pria, kesempatan pendidikan bagi kaum perempuan baru didirikan sebatas organisasi-organisasi keperempuanan, yang mencapai pemerataannya pada sekitar tahun 1920-an. (Locher-Scholten 2000:21) Sebagai gambaran, diterangkan bahwa di Bandung dan di Garut, telah berdiri pendidikan bagi kaum perempuan pribumi dibawah organisasi "Kaoetamaan Istri", sementara di Buitenzorg, didirikan sekolah bagi perempuan pribumi dari pelosok desa yang dikirimkan oleh "Buitenzorg Raden

¹ Sebagaimana tergambarkan dalam novel *Para Priyayi* karya Umar Kayam, yang menceritakan tokoh Sastrodarsono, seorang priyayi rendah yang naik kelas sosialnya menjadi priyayi tinggi, serta tokoh Lantip, *wong cilik* yang naik kelas sosialnya menjadi priyayi (Kayam 1992).

Kartinischool", dengan mencontoh kegiatan yang ada di Bandung. Di Tasikmalaya didirikan serikat "Kaoetamaan Istri Tasikmalaya", yang dalam undang-undangnya bertujuan pada pembentukan sekolah untuk menyediakan layanan pendidikan bagi anak perempuan pribumi yang tinggal di Afdeling Soukapoera wilayah Residen Preanger di bawah pimpinan Nyi Raden Dewi. Di Afdeeling Kediri, oleh persatuan "Boedi Oetomo" juga akan dibuka sekolah bagi perempuan pribumi di sebagian Kediri. Dan dalam pertemuannya di Djokjakarta, serikat-serikat-serikat tersebut menyepakati untuk menganjurkan dan mengakui seluruh upaya pembukaan kesempatan pendidikan tersebut (G.A.J. Hazeu 1913).

Sosok Kartini (1879-1904), seakan sudah menjadi mitos dan acuan bagi studi gerakan feminisme di Indonesia. Locher-Scholten berpendapat bahwa tiga bagian garis perjuangannya yakni kesempatan untuk mengenyam pendidikan bagi kaum perempuan, anjuran monogami, dan re-evaluasi tata kebudayaan Jawa yang dinilai tidak memberikan ruang bagi perempuan untuk maju, telah menjadi standar atau panduan bagi gerakan-gerakan feminisme di Indonesia pada masa kemudian (Locher-Scholten 2000:21; Taylor 1989:295). Dari sini, jika diasumsikan bahwa dalam dunia kolonial, perempuan mengalami marginalisasi ganda, sementara platform perjuangan Kartini berkuat dalam usaha emansipasi dan pemutusan garis marginalisasi tersebut; maka barangkali ruang yang lebih kentara dari pada pendidikan bagi kajian peran perempuan dan modernisasi adalah lewat corong kebudayaan.

Nyai Ontosoroh

Salah satu sisi menarik dari dunia kolonial adalah pergundikan, dimana untuk kesekian kalinya, perempuan berposisi sebagai objek dari suatu peristiwa kebudayaan. Dalam Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, istilah *njahi* atau *nyai*—kadang kala disebut *munci* untuk gundik di barak militer (Poeze, Dijk, and van der Meulen 2008:86)—secara literal berasal dari bahasa Jawa yang bermakna ganda, pertama menunjuk pada perempuan terhormat pada masa pertengahan, dan yang kedua berarti kekasih atau gundik orang Eropa.(Ming 1983:71) Secara lebih mendalam, Razif Bahari menjelaskan bahwa konsep *nyai* menunjukkan makna seorang perempuan, biasanya pribumi, yang tinggal bersama orang asing (bisa Belanda, Indo, Arab, Cina), yang tidak dieratkan oleh ikatan perkawinan yang sah, dimana meskipun terdapat kebijakan *gelijkstelling* atau penyamaan hak bagi warga negara Belanda untuk menjadi warga pribumi, namun *nyai* adalah *personae non gratae* (orang yang tidak dikehendaki ada), maksudnya tidak memiliki legalitas untuk memperjuangkan haknya dan hak anak-anaknya di depan hukum. *Nyai*, barangkali lebih rendah daripada istri atau *bini simpanan* atau *bini piaraan*, yang diibaratkan seperti barang hak milik, yang sudah dibeli, dan bisa kapan saja diusir dari rumah tuannya, tanpa alasan pasti. Di dalam rumah tuannya, ia biasanya bertugas sebagaimana pekerja rumah tangga: memasak, mencuci, juga mengajari bahasa, menjadi penasihat keuangan tuannya, serta ibu bagi anak-anaknya(Bahari 2007:44).

Pembahasan kali ini, tidak berfokus pada dunia pergundikan dalam barak tentara Eropa, melainkan *nyai* dalam dunia sastra atau roman sejarah yang ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer. Diantara karya Pram yang terkenal adalah empat seri novel yang berlatar belakang dunia kolonial pada akhir abad XIX hingga awal abad XX (masa kebangkitan nasional), dimana pada sebagian besar tulisannya, terdapat tokoh *nyai*, yang seakan menjadi tokoh utama kedua setelah tokoh Minke, yang bernama asli Sanikem dan berganti menjadi Nyai Ontosoroh. Perempuan pribumi yang dijual oleh ayahnya sendiri kepada Tuan Herman Melemma ini, di kemudian hari berubah, dari gadis pingitan yang sama sekali tidak mengenyam bangku sekolah menjadi seorang perempuan karir yang memimpin perusahaan, memiliki kemampuan baca tulis yang setara atau bahkan melebihi seorang siswa HBS (jenjang sekolah tertinggi saat itu), mampu berbicara bahasa Belanda secara fasih dan sopan, terbiasa dengan kebudayaan atau adat-istiadat Eropa dalam makan, kebersihan, bergaul, bersikap, dan seterusnya (Bahari 2007).

Kemampuan otodidak dan kebiasaan “modern” ala Eropa ini sebenarnya merupakan hal yang wajar, mengingat Sanikem sudah dididik oleh Herman Melemma selama kurang lebih lima tahun, namun yang menjadikannya menarik adalah status sosialnya yang rendah, sesuai dengan penilaian pada masa itu. Seorang *nyai*, dalam pandangan umum kala itu, adalah manusia yang tidak mengenal perkawinan syah, melahirkan anak-anak tidak syah, sejenis manusia dengan kadar kesusilaan rendah, menjual kehormatan untuk kehidupan senang dan mewah (Toer 1981:38). Bahkan yang lebih menariknya lagi, bahwa kemampuan dan kebiasaan kehidupan modern tersebut dikembangkan atau dipakai oleh Nyai Ontosoroh untuk “melawan” ketidakadilan dan kesewenang-wenangan penjajah. Salah satu adegan, dimana nampak modernitas berpikir ala Barat dari Nyai Ontosoroh adalah tatkala ia dihadirkan sebagai saksi, dan diberi pertanyaan mengenai tindakannya membiarkan perbuatan tidak patut antara Minke dan Annelies, dimana Nyai Ontosoroh menganalogkan dan mempertanyakan hubungan Minke-Annelies yang diusut sementara hubungan Herman Melemma-Sanikem tidak diusut, sebagai bentuk diskriminasi sikap hukum kepada bangsa Totok dan Indo (Herman Melemma dan Annelies) terhadap Pribumi (Sanikem dan Minke) (Toer 1981:425-427).

KESIMPULAN

Penelusuran sejarah modernitas yang menempatkan perempuan sebagai agen, memang tidak hanya menghadirkan tokoh-tokoh sebagaimana yang teridentifikasi di atas; *babu*, siswi sekolah, dan *nyai*. Lebih dari itu, pengaruh mereka sebagai agen modernisasi yang relatif dan tidak memiliki ukuran pasti, bisa saja menggugurkan argumen dari tulisan ini. Namun demikian, kerangka penuturan sejarah yang tidak hendak membuktikan hipotesis ini, memiliki kemungkinan untuk dijadikan langkah awal bagi kajian dan penulisan yang lebih mendalam, mengenai *babu* yang “profesional dan modern”, atau sosok Nyai Ontosoroh dalam realitas sejarah.

DAFTAR RUJUKAN**Buku dan Jurnal**

- Bahari, Razif. *Between a Rock and a Hard Place? Interstitial Female Subjectivity in between Colonialism and Patriarchy: Women in Pramoedya Ananta Toer's Buru Tetralogy*, dalam *Indonesia*, No. 83 (Apr., 2007), hal. 41-77 (online) <http://www.jstor.org/stable/40376413> (diunduh 16 Januari 2013 pukul 03:47)
- Bloembergen, Marieke dan Remco Raben. 2009. *Het Koloniale Beschavingsoffensief Wegen naar het nieuwe Indie 1890-1950*. Leiden: KITLV Uitgeverij.
- Dijk, Kees van dan Jean Gelman Taylor (Ed). 2011. *Cleanliness and Culture Indonesian Histories*. Leiden: KITLV Press.
- Kayam, Umar. 1992. *Para Priyayi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- McGee, Terry. *Jalan, jalan; invading, destroying, and reconstructing the Southeast Asian City*, dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, On the road The Social Impact of new roads in Southeast Asia* 158 (2002), no. 4, Leiden, hal. 637-652, (online) <http://www.kitlv-journals.nl> (diunduh 15 Januari 2013 pukul 13:53)
- Ming, Hanneke. *Barracks-Concubinage in the Indies, 1887-1920*, dalam *Indonesia*, No. 35 (Apr., 1983), hal. 65-94 (online) <http://www.jstor.org/stable/3350866> (diunduh 16 Januari 2013 pukul 03:47)
- Poeze, Harry A. (Ed.). 2008. *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950 (terj.)* Jakarta: KPG dan KITLV-Jakarta.
- Ricklefs, Merle Calvin. 2001. *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. Hampshire: PALGRAVE.
- Smith, Bonnie G. (et. al.). 2012. *Crossroads and Cultures A History of the World's Peoples*. Boston-NY: Berford/ St. Martins.
- Scholten, Elsbeth Locher. 2000. *Women and the Colonial State. Essays on Gender and Modernity in the Netherland Indies. 1900-1942*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Taylor, Jean Gelman. *Kartini in Her Historical Context*, dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 145 (1989), No: 2/3, Leiden, hal. 295-307 (online) <http://www.kitlv-journals.nl> (diunduh 16 Januari 2013 pukul 05:58)
- Toer, Pramoedya Ananta. 2005. *Bumi Manusia*. Jakarta: Lentera Dipantara.
- van Imhoff, Evert, dan Gijs Beets. *a Demographic History of the Indo-Dutch Population, 1930-2001*, dalam *Journal of Population Research*, Vol. 21, No. 1 (March 2004), hal. 48, (online) <http://www.jstor.org/stable/41110781> (diunduh 16 Januari 2013 pukul 01:53)
- Wood, Ellen Meiksins. *Modernity, Postmodernity, or Capitalism?. Review of International Political Economy*, Vol. 4. No. 3, *The Direction of Contemporary Capitalism* (1997), hal. 539-560, (online) <http://www.jstor.org/stable/4177238> (diunduh 15 Januari 2013 pukul 01:46)

Arsip dan Dokumen

Onderwijs voor inlandse meisjes. Directeur van onderwijs en eredienst (G.A.J. Hazeu) aan gouverneur-generaal (Idenburg), 4 Maart 1913.